

Buletin Parlementaria

Nomor 149/V/2021 • Mei 2021



DPR Pastikan Kawal Bantuan Untuk Pemulihan Korban Gempa Malang



3 Muhaimin Iskandar
Serukan Kebijakan
Ekonomi Hijau



4 Rachmat Gobel
Akan Rancang
Kawasan Ekonomi
Halal di Gorontalo



9 772614 339005



BULETIN

DPR Pastikan Kawal Bantuan Untuk Pemulihan Korban Gempa Malang

Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani memastikan DPR RI akan terus mengawal serta mengawasi penanganan dampak bencana alam dan pemulihan kehidupan korban gempa Malang, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu. Puan menjelaskan, DPR RI langsung berkomunikasi dengan pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pihak terkait lainnya saat terjadi gempa di Malang.

Komunikasi itu berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat. “Sampai sekarang pun DPR RI masih terus memantau dan mengawasi perkembangan penanganan bencana,” kata Puan saat menemui korban gempa di Desa Majang Tengah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4).

Di lokasi tersebut, Puan berkeliling dan berdialog dengan korban gempa sambil melihat proses renovasi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa. Puan menemui korban gempa di Malang bersama Presiden Joko Widodo. Sebelum menemui korban gempa, Puan bersama Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, dan menemui petani pada panen raya di Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

Sebelumnya, gempa berkekuatan 6,1 SR sempat mengguncang Malang pada 10 April lalu. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, sebanyak 32 kecamatan terdampak



Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani bersama Presiden RI Joko Widodo menemui korban gempa di Desa Majang Tengah, Krajan, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Foto: Gerald/Man

gempa tersebut, dengan korban meninggal dunia dan korban luka-luka.

Selain itu, gempa juga menyebabkan 5.750 rumah rusak ringan, 3.894 rumah rusak sedang, dan 1.716 rumah rusak berat, serta lebih dari 300 unit fasilitas umum di Malang rusak akibat diguncang gempa tersebut. “DPR RI akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menghadirkan langkah-langkah yang jelas dan nyata untuk membantu Bapak Ibu sekalian,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan mendukung langkah pembangunan 300 hunian sementara untuk warga korban gempa. Hunian sementara itu dibangun bertahap dan akan lebih layak dari pengungsian, serta lebih aman dari ancaman penyebaran Covid-19. “Kami di DPR RI akan terus bekerja dalam kapasitas kami untuk memulihkan kehidupan Bapak Ibu sekalian,” ujar Puan, yang

sempat berbincang dengan sejumlah warga korban gempa di lokasi tersebut.

Puan mengapresiasi semua pihak yang bergerak cepat dalam membantu para korban gempa Malang, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNPB, BPBD, TNI, Kepolisian, dan semua pihak yang terlibat. Ia menegaskan, DPR RI akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara keseluruhan.

Menurut Puan, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus merata di seluruh daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur dan lain sebagainya. “Karena Indonesia ini berada di dalam *Ring of Fire*. Jadi kita harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi bencana,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V itu. ■ alw/sf

Muhaimin Iskandar Serukan Kebijakan Ekonomi Hijau



Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Ojji/nvl

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyerukan kembali pentingnya mengambil arah kebijakan ekonomi hijau untuk mempertahankan sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi hijau, model pembangunan pun harus berkelanjutan.

Gus Ami, sapaan akrabnya, menyampaikan ini usai menjadi pembicara kunci pada webinar yang digelar Koalisi Pemerhati Lingkungan dengan tajuk 'Green Economy Mendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia', Kamis (29/4). Menurutnya, ekonomi hijau adalah ekonomi yang menempuh langkah pemulihan hijau dengan

memprioritaskan model pembangunan berkelanjutan.

Semuanya berporos pada paradigma pembangunan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi, keterjagaan lingkungan dan ketahanan sosial sebagai satu tarikan nafas pelaksanaan pembangunan. "Pembangunan yang kita lakukan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, kemampuan sumber daya alam kita terus menurun. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup," kata Gus Ami.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, Indonesia saat ini berada di jalur pembangunan yang sulit untuk dipertahankan. Eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi berbahan fosil, telah berdampak pada kualitas lingkungan. Selain itu, model pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif telah menyebabkan bencana ekologis dan hidrometeorologi yang semakin sering terjadi.

Pendekatan pembangunan yang ditempuh selama ini, lanjut mantan Menteri Ketenagakerjaan ini, dapat tidak berkelanjutan dan berpotensi membatasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Upaya mewujudkan visi Indonesia yang maju dan lestari membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pengusaha/swasta, politisi, penentu kebijakan, kepala daerah, dan kelompok sipil. ■ mh/sf



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual Ramadhan, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos, Erlangga Panji Sarnudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patulli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrul, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldito Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitriantoro

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Rachmat Gobel Akan Rancang Kawasan Ekonomi Halal di Gorontalo



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menjadi *keynote speaker* pada diskusi yang diselenggarakan OJK. Foto: Jaka/mv

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengungkapkan, saat ini ia sedang merancang kawasan ekonomi halal di Provinsi Gorontalo untuk memecah kemiskinan dan menyejahterahkan rakyat di daerah tersebut. Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya akan menggandeng kerja sama dengan Turki dan Jepang yang memiliki ekonomi kuat dan teknologi yang maju. Kawasan itu meliputi industri pertanian, peternakan, kelautan, olahan, hingga industri olahan.

“Sehingga kita tidak lagi ekspor bahan mentah, tapi sudah jadi olahan. Saya juga telah berdiskusi dengan Dubes Indonesia untuk Turki dan mitra saya di Jepang untuk bisa bekerjasama membangun kawasan ekonomi halal dengan teknologi maju yang mereka miliki,” ujar Gobel saat menjadi *keynote speaker* pada diskusi yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertema “Potensi

Keuangan Syariah di Provinsi Gorontalo”, di Gorontalo, Kamis (29/4).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, Gorontalo setidaknya memiliki tiga kekuatan yang potensinya bisa lebih digali dan dimaksimalkan, yakni, pertanian, perkebunan dan kelautan. Menurut Gobel, setidaknya diperlukan 50.000 hektar untuk industri pengolahan beras atau jagung. Jika tiap 1000 hektar dibutuhkan satu mesin industri, berarti akan ada 50 mesin yang tersebar di Gorontalo.

“Dengan begitu, tentu kekuatan kita akan bisa naik lebih besar. Belum lagi jika didukung oleh kualitas pupuk dan bibit yang lebih baik, sehingga bisa meningkatkan dua kali lipat produksinya. Saya bisa membayangkan keuntungan yang bisa didapat dari para petani dan peternak dengan peningkatan produksinya,” optimis Gobel.

Selain itu, masih kata legislator dapil Gorontalo tersebut, DPR RI belum lama ini sudah mengesahkan *Omnibus Law* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja

yang bertujuan untuk menarik investasi dari investor asing. Hal tersebut pada dasarnya bersifat baik, tapi kekuatan asing itu hanyalah pelengkap, bukan hal yang utama dalam membangun ekonomi Indonesia.

“Yang harus kita bangun adalah ekonomi rakyat. Kalau kita bicara lapangan kerja, justru menurut saya pertanian, perkebunan, dan kelautan sangat potensial untuk itu. Maka harus didorong lebih tinggi lagi, yakni kedaulatan pangan, sehingga kita tidak bergantung lagi kepada asing untuk impor pangan. Mereka para petani, peternak, nelayan dan UMKM memang masih skala kecil ibarat satu lidi, tapi kalau mereka diikat bersama dalam sebuah koperasi akan menjadi kekuatan besar,” imbuh Gobel.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, pada dasarnya Gorontalo sebetulnya memiliki kekayaan di sejumlah sektor, namun yang pertanyaan, siapa yang akan menggali kekayaan itu. Jika tidak melakukan apa-apa, jangan harap ke depan masyarakat Gorontalo bisa menjadi tuan di kampungnya sendiri.

“Kekhawatiran saya, dari pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, seperti orang Betawi di Jakarta dulu kayanya luar biasa tanahnya di sana-sini. Tapi sekarang sudah dimiliki oleh investor-investor besar, apakah Gorontalo mau demikian? Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu harus kita gali kekayaan yang kita miliki, dimulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, dan peternakan,” pesan Gobel. ■ jk/sf

Negara Harus Beri Perhatian pada Keluarga Awak KRI Nanggala-402



Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani bertemu dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani bertemu dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, Jawa Timur. Puan hadir mendampingi Presiden Joko Widodo untuk bersilaturahmi dan memberikan bantuan kepada keluarga korban kapal selam yang dinyatakan *subsunk* di utara laut Bali tersebut.

“Kami menyadari bahwa duka yang paling dalam pasti dirasakan oleh anggota keluarga, karena itu sejak awal DPR RI terus berkomunikasi dengan pemerintah agar negara memberikan perhatian kepada para keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Puan usai

silaturahmi di Shelter Lanudal Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/4).

Puan menyampaikan, sebagai salah satu bentuk penghormatan pada awak KRI Nanggala-402, di Gedung DPR/MPR dan di seluruh rumah dinas anggota DPR/MPR dikibarkan bendera merah putih setengah tiang pada 26-28 April 2021. Saat ini, kata Puan, DPR RI fokus mendukung pemerintah dalam proses pencarian jenazah para korban. Puan mendorong segala upaya dilakukan optimal, termasuk mengangkat kapal selam dari laut dalam.

“Saat ini kami menghormati keluarga yang masih sangat berduka. Begitu juga kami tahu Indonesia masih kaget

dan berduka dengan adanya peristiwa ini,” ujarnya. Namun ke depan, politisi PDI-Perjuangan itu memastikan bahwa DPR RI akan membahas segala sesuatu dengan pemerintah terkait tragedi KRI Nanggala-402 dan keseluruhan alutsista serta pertahanan Indonesia.

“Semua pasti satu pemahaman bahwa tidak ingin tragedi seperti ini terulang kembali,” ungkap Puan. Legislator dapil Jawa Tengah V itu menjelaskan, DPR RI pasti akan membangun dialog dengan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik kepada para prajurit agar dapat menjalankan tugasnya dalam melindungi negara. ■ eko/sf

Komisi I Nilai Areal Latihan Yonkav 4 Kijang Cakti Sudah Tak Layak



Tim Kunker Komisi I DPR RI meninjau berbagai fasilitas Batalyon Kavaleri 4/Kijang Cakti. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi I DPR RI Farhan memperoleh sejumlah informasi bahwa Batalyon Kavaleri (Yonkav) 4/Kijang Cakti Kota Bandung tidak memiliki area lahan latihan yang luas. Bahkan areal latihan itu sudah tidak memungkinkan untuk digunakan latihan oleh alutsista (alat utama sistem pertahanan) jenis kendaraan berat.

Hal tersebut menjadikan lokasi latihan prajurit TNI sudah tidak layak dan relevan, serta ramai oleh penduduk dan ramai lalu lintas. Farhan mendorong pemerintah dari tingkat pusat dan daerah untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan ini.

“Sebagaimana bentuk dukungan terhadap peran dan tugas TNI, sudah seharusnya pemerintah ataupun kementerian terkait bisa bekerjasama dan bersinergi mewujudkan lokasi latihan yang layak dan relevan untuk digunakan latihan prajurit,” kata Farhan usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf Komando Daerah Militer III/Siliwangi Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Komandan Batalyon Kavaleri 4/KC Letnan Kolonel Kavaleri Christian Gordon Rambu serta Asisten Kasdam III/Siliwangi, dan Kabalak Kodam III/Siliwangi di Yonkav 4/KC, Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Lebih lanjut politisi Partai NasDem itu menilai sangat penting adanya fasilitas tempat latihan yang luas, layak dan relevan bagi prajurit TNI. Menurutnya tidak ada gunanya jika memiliki alutsista yang canggih namun tidak memiliki tempat latihan.

“Saya rasa persoalan ini salah satu prioritas yang harus kita utamakan. Diharapkan para prajurit TNI yang berada di bawah naungan Yonkav 4/ Kijang Cakti dapat memiliki tempat latihan yang sesuai prosedur sebagai mana mestinya. Dengan demikian latihan para prajurit TNI bisa maksimal,” harap Farhan.

Di sisi lain, masih kata Farhan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan tugas dan fungsi TNI dalam menjalankan tugas negara. “Salah satunya adalah tentang kesejahteraan prajurit, diharapkan dari hasil Panja Kesejahteraan Prajurit bisa menemukan, mengidentifikasi mana saja yang menjadi prioritas yang harus Komisi I pilih guna mewujudkan kesejahteraan prajurit mulai dari uang makan hingga tempat tinggal,” tandas legislator dapil Jawa Barat I itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Bambang Heri mengkritisi peralatan alutsista Yonkav 4/KC jenis tank yang sudah sangat tua, sehingga perlu diperbaiki. “Dengan demikian saya mengharapakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertahanan bisa meningkatkan anggaran untuk alutsista, sebagaimana kita lihat fungsi dari alat itu sendiri sudah tidak maksimal,” harap politisi Partai Golkar itu.

Kekuatan personel Yonkav 4/KC yang saat ini hanya 60 persen, dinilai Bambang juga perlu ditingkatkan. Diketahui kekurangan yang saat ini diperlukan yakni 7 perwira, 7 bintangara dan 79 tamtama. “Saya menilai kekurangan ini perlu dievaluasi lagi. Pasalnya tidak menutup kemungkinan jika terus berjalan seperti saat ini, kekuatan dari Yonkav 4/KC bisa turun di angka 50 persen, itu yang saya tidak inginkan,” imbuh politisi dapil Kalimantan Selatan I itu. ■ rni/sf

Konflik Pertanahan Masyarakat Riau dengan Perusahaan Migas Harus Segera Diselesaikan

Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan permasalahan pertanahan yang melibatkan salah satu perusahaan Migas besar (PT Chevron) di Riau harus segera diselesaikan. Hal ini di didapati saat Tim Kunker Komisi II DPR RI bertemu dengan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, dimana beberapa permasalahan pertanahan yang terjadi di Riau salah satunya melibatkan PT Chevron.

“Tuntutan masyarakat atas Lahan seratus meter yang berada di kiri dan kanan pipa Chevron sepanjang 180 km. Lahan itu dikuasai oleh Chevron tentu untuk kepentingan pengamanan pipa. Adanya tuntutan dari masyarakat karena banyak masyarakat yang sudah berinvestasi di lahan itu seperti pembangunan ruko, rumah dan sebagainya,” ungkap Arsyad di Riau, baru-baru ini.

Ia melanjutkan, permasalahan muncul

ketika beberapa tahun lalu pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Banyak masyarakat yang merasa sudah berinvestasi dan tidak ingin meninggalkan area tersebut. Kalaupun harus pergi, mereka berharap diberikan ganti untung atas lahan yang sudah didiaminya.

“Saya berharap permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Bahkan, kami (Komisi II DPR RI) akan membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan Menteri ATR/BPN, Kepala Daerah atau



Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman. Foto: Ayu/Man

”

TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS LAHAN SERATUS METER YANG BERADA DI KIRI DAN KANAN PIPA CHEVRON SEPANJANG 180 KM. LAHAN ITU DIKUASAI OLEH CHEVRON TENTU UNTUK KEPENTINGAN PENGAMANAN PIPA. ADANYA TUNTUTAN DARI MASYARAKAT KARENA BANYAK MASYARAKAT YANG SUDAH BERINVESTASI DI LAHAN ITU SEPERTI PEMBANGUNAN RUKO, RUMAH DAN SEBAGAINYA

Gubernur Riau, serta instansi terkait lainnya. Guna mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, bagi PT Chevron dan tentunya juga terbaik bagi masyarakat,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Tim kunjungan kerja yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang ini, juga diikuti oleh Anggota Komisi II DPR RI lainnya, seperti Nasir Djamil, Zulfikar Arse Sadikin, Cornelis, Guspari Gaus, Chairul Anwar, Prasetyo Hadi, Endro Suswantoro, dan Wahyu Sanjaya. ■ ayu/es

Anggaran BNN Perlu Ditingkatkan

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyatakan, perlu adanya peningkatan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Mengingat peran yang dijalankan BNN sangat penting dalam memberikan rehabilitasi dan pelatihan terhadap para pelaku narkoba. Hal tersebut disimpulkannya berdasarkan hasil kunjungannya ke Pusat Rehabilitasi Narkotika di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“Tapi yang pasti kemarin kita ingin sekali BNN yang berhubungan dengan APBN-nya itu harus ditambah. Lebih lagi kemarin kita ke Lido, melihat bagaimana kegiatan-kegiatan laboratorium lalu pendidikan terhadap korban narkoba. Jadi sangat membutuhkan dukungan anggaran,” kata Adang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Denpasar Bali, baru-baru ini.

Di sisi lain banyak yang menilai BNNP Bali tidak memiliki inisiatif dalam menghadapi persoalan



KE DEPANNYA PERAN APARAT PENEGAKAN HUKUM YANG ADA DI BALI BAIK ITU KEPOLISIAN, BNNP BALI, DAN KEJAKSAAN AGAR DAPAT TERUS BEKERJA SAMA SECARA TERINTEGRASI UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA MASING-MASING LEMBAGA YANG SEMAKIN BAIK

peredaran narkoba di Bali. Sehingga tak salah jika kemudian ada tanggapan untuk meleburkannya dengan Kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Adang mengajak untuk bersikap objektif dengan membiarkan kedua

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Nadia/nvl



lembaga baik itu Kepolisian maupun BNNP Bali sama-sama menindak pelaku narkoba.

Politisi Fraksi PKS ini berharap, ke depannya peran aparat penegakan hukum yang ada di Bali, baik itu Kepolisian, BNNP Bali, dan Kejaksaan agar dapat terus bekerja sama secara terintegrasi untuk mewujudkan kinerja masing-masing lembaga yang semakin baik, dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Bali, juga bagi para wisatawan.

Berbeda dengan Adang, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menilai BNNP Bali tidak memiliki tindakan yang konkret dalam pencegahan peredaran narkoba, sehingga wajar jika ada wacana peleburan BNNP Bali dengan Kepolisian.

“Ya memang kita juga merasa hampir tidak ada tindakan konkret,

dilakukan oleh BNNP Bali dalam konteks untuk pencegahan dan pemberantasan masalah narkoba dan kewenangan itu ada pada institusi ini sebagai *leading* sektor, kalau memang dalam konteks itu yang bersangkutan itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik saya kira perlu dipikirkan ulang bagaimana agar BNNP Bali ini bisa dilebur saja masuk di institusi Kepolisian, agar peredaran narkobanya bisa lebih efektif. Makanya kita beri dukungan penuh kepada Kapolda Bali,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kapolda Bali Putu Jayan Danu Putra berharap, dirinya bisa mewujudkan dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, utamanya terkait dengan penanganan peredaran narkoba. “Mengingat narkoba adalah masalah bersama,” pungkasnya. ■ ndy/es

Komisi IV Minta Ekosistem Ikan Bilih Dipulihkan

Ikan bilih merupakan ikan endemik yang memiliki populasi terbesar dan hanya ditemukan di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menginginkan agar ada alternatif untuk mengembangkan ikan bilih agar tidak punah.

“Ikan khas Danau Singkarak sudah mulai punah, harus ada alternatif untuk pemulihan ekosistem karena ribuan masyarakat yang sampai saat ini masih bergantung pada Danau Singkarak ini,” ujar Anggia usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Danau Singkarak, Sumatera Barat, baru-baru ini. Turut didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan dan Kadis Lingkungan Hidup Sumbar.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerangkan penyebab terancam punahnya ikan bilih dipicu oleh alat dan cara tangkap yang digunakan masyarakat tidak ramah lingkungan. Nelayan menggunakan berbagai jaring untuk menangkap ikan bilih sesuai dengan lokasi penangkapannya seperti jaring panjang, jaring lingkaran bahkan setrum listrik yang mematikan semua ikan.

“Tidak hanya karena aktivitas penangkapan ikan, kelestarian ikan bilih juga terancam akibat aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar danau Singkarak. Jika dibiarkan berlanjut, maka beban pencemaran ekosistem Danau Singkarak semakin berat. Pada akhirnya akan merugikan semua pihak termasuk kelestarian biota danau khususnya ikan bilih,” terang legislator dapil Jatim VI itu.

Di tempat yang sama Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menjelaskan, pertumbuhan ikan bilih saat ini masih secara alami



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini memimpin Tim Kunker ke Danau Singkarak, Sumbar. Foto: Arief/nvl

dan belum disentuh oleh teknologi. Populasinya akan mengalami penurunan ketika masyarakat melakukan penangkapan untuk pemenuhan kebutuhannya. Jika tidak tersentuh teknologi dalam pengembangan dan budidayanya, lambat laun ikan bilih mengalami kepunahan.

“Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, khusus kepada Dirjen

Budidaya, harus ada sentuhan teknologi yang bisa mengembangkan dan membudidayakan ikan bilih. Sehingga bisa pulih selain tumbuh secara alami tetapi juga tumbuh secara teknologi untuk memenuhi permintaan masyarakat dan diekspor ke luar dari daerah sampai ke Jakarta karena ikan ini terkenal satu-satunya ikan endemik yang hanya ada di Danau Singkarak,” pungkas politisi PKS tersebut. ■ afr/es

Pemerintah Harus Perluas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti berharap, agar pemerintah memperluas alokasi dan titik sebaran program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat serta program padat karya, yang dapat membantu ketahanan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk mencapai hal itu, pemerintah harus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk proyek sejumlah infrastruktur di Kota Surakarta progresnya sudah cukup bagus. Tapi saya juga berharap tidak hanya di Surakarta saja, daerah lain juga bisa jadi prioritas. Walaupun sekarang kondisi keuangan sedang seperti ini, tapi perencanaan ini bisa *multiyears*. Sehingga target dari pekerjaan pemerintah, pemkot atau kabupaten lainnya bisa tercapai,” kata Novita saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di sejumlah pembangunan infrastruktur Kota Surakarta, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra mengusulkan, agar rancangan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Surakarta ini disebarkan. “Jadi dalam merancang proyek itu supaya lebih realitis dan bagus. Karena peserta yang mengikuti juga biasanya dari para ahli-ahli. Jadi betul-betul mendapat desain yang terbaik, setelah dipilih 3 atau 5 besar, wali kota tinggal memilih mana yang terbaik. Bahkan kalau perlu diumumkan ke warga agar mereka juga merasa dilibatkan,” terangnya.

Wakil rakyat dari dapil Sumatera Selatan I ini mendukung infrastruktur yang akan dibangun di Surakarta. Dengan adanya perbaikan infrastruktur, Surakarta tetap menjadi kota yang nyaman, warganya bahagia, dan perekonomian cepat pulih.

“Sejauh yang kami pantau dari empat titik lokasi tidak ada kendala berarti. Hanya saja, saya berharap agar dalam merancang harus secara total, sehingga pembangunan infrastruktur ini betul-betul bermanfaat untuk warga Kota Surakarta terutama dalam pemulihan ekonominya,” tutupnya.

Diketahui, sejumlah proyek pemerintah pusat yang akan dibiayai oleh APBN di Kota Surakarta diantaranya, Jembatan layang (flyover) Purwosari, pengembangan Plaza Ngarsopuro, revitalisasi Taman Budaya Balekambang sebagai pusat kebudayaan Surakarta, Rehabilitasi Kawasan Bendung Tirtonadi dan Bantuan Perumahan di Kelurahan Semanggi. ■jk/es



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti (paling kiri) saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Surakarta, Jawa Tengah. Foto: Jaka/nvl

Sarana dan Prasarana IKN Harus Terintegrasi dengan Baik

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengungkapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur harus segera dilakukan, hal ini semata untuk mengurangi beban yang ditanggung Jakarta. Dari sisi ekologis, Jakarta punya masalah yang tidak ringan. Lingkungan hidup di Jakarta kian hari kehilangan daya dukung akibat konsep dan arah pembangunan. Potensi kebencanaan Jakarta pun cukup tinggi mengingat posisinya di Pulau Jawa yang berada di sesar atau patahan tubuh bumi yang mengalami pergerakan.

Melihat hal tersebut, dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, politisi yang akrab disapa Demer ini mengungkapkan agar dalam rencana pembangunan IKN seluruh sarana dan prasarana harus terintegrasi dengan baik. Oleh sebab itu, dalam rapat Kunjungan Kerja

ke Kalimantan Timur, Komisi VI mengundang PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN Batubara, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular.

“Kami ingin memastikan bahwa ke depan semua terintegrasi dengan baik, kemudian juga kesiapan dari energinya, apakah Pertamina siap untuk ketersediaan gas, minyak bumi, dan juga kekuatan dari PLN dalam melayani masyarakat dan juga kantor-kantor vital di Ibu Kota Negara ini,” papar Demer di Balikpapan, Kaltim, baru-baru ini.

Sebelumnya, pembangunan sarana di beberapa kota di Indonesia selalu tumpang tindih. “Sering kali kita melihat semua kota di Indonesia ini, selalu tumpang tindih soal sarana prasarana ini, sebentar-sebentar gali PLN, sebentar-sebentar gali Telkom, pasang lagi untuk gas, pasang lagi untuk air minum dan sebagainya,” urai Demer.

Jakarta, menurut Demer, sudah menanggung beban sebagai Ibu Kota Negara, pusat birokrasi, juga sebagai pusat perputaran ekonomi, pusat perdagangan,

”

MELIHAT JUGA BEBAN KONDISI JAKARTA, DAYA TAMPUNG JAKARTA JUGA SUDAH BERAT.

dan pusat-pusat yang lain. Jakarta yang notabene ialah kota tua, tak lagi punya langkah gesit untuk mengejar infrastruktur demi mengimbangi populasi yang berkembang amat cepat.

“Melihat juga beban kondisi Jakarta, daya tampung Jakarta juga sudah berat. Kita tahu saat ini banjir, tanah turun, potensi air juga kurang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai Ibu Kota Negara yang baru,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, potensi Kaltim sangat bagus. Berada di tengah-tengah dan tidak rawan bencana. Dengan adanya Ibu Kota Negara di Kaltim, diharapkan bisa mendukung pembangunan di Indonesia bagian timur. Terlebih lagi, dalam pembiayaan pembangunan IKN tidak akan menggunakan anggaran negara terlalu banyak.

“Saya sangat mendukung sekali karena saya rasa sebenarnya pemerintah tidak perlu keluar uang banyak untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini. Karena dari lahan yang ada bisa dikomersialkan sehingga ada banyak pemasukan bagi pemerintah. Saya pikir kita tidak bicara *budget* yang banyak untuk IKN ini, tinggal kesiapan kita. BUMN bisa bekerjasama dengan swasta, banyak properti yang ada di Kalimantan Timur ini bisa dikerjasamakan,” pungkas Demer. ■

eko/es



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih.
Foto: Eko/nvl

Pengembangan Energi Nuklir Bukan Opsi Terakhir

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Pattiidjaya mengatakan bahwa jangan lagi menempatkan energi nuklir sebagai opsi terakhir pengembangan energi seperti yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Menurutnya, saat ini dunia telah melihat potensi tersebut dan berlomba-lomba untuk mengembangkannya.

Pernyataan itu disampaikan ketika mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan BATAN dan Kemenristek di Auditorium Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, baru-baru ini. Bambang menegaskan, pemerintah harus segera melakukan kajian mengenai kegemaran negara di dunia dalam mengembangkan energi nuklir.

“Kita melihat realita bahwa energi nuklir ini merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan. Kita sendiri melihat bagaimana Uni Emirate Arab yang

resource terhadap nuklirnya kecil, bahkan ikut mengembangkannya. Oleh karena itu saya pikir kita harus

”

INDONESIA ADALAH SALAH SATU NEGARA YANG MEMILIKI ENERGY RESOURCE YANG SANGAT BESAR UNTUK MENGEMBANGKAN TENAGA NUKLIR. UNTUK ITU IA BERHARAP PERAN PEMERINTAH DAN PARA PENELITI UNTUK BISA MENGEMBANGKANNYA. IA TIDAK INGIN RESOURCE TERSEBUT BISA DIKUASAI OLEH NEGARA LAIN.

melakukan satu telaah lebih jauh bahwa nuklir ini harus masuk dalam portofolio super energi Indonesia ke depannya,” jelas Bambang.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki *energy resource* yang sangat besar untuk mengembangkan tenaga nuklir. Untuk itu ia berharap peran pemerintah dan para peneliti untuk bisa mengembangkannya. Ia tidak ingin *resource* tersebut bisa dikuasai oleh negara lain.

“Ada uranium, plutonium. Sehingga pemberdayaan nuklir ini dapat ditingkatkan dan diberikan ruang untuk berkembang. Kita bisa mulai itu dalam rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang sekarang sedang digodok di Komisi VII. Nah, saya pikir dalam hal ini posisi BATAN sangat strategis dan harus diberdayakan, sumber manusianya juga saya pikir pasti ada,” tukasnya. ■ *er/sf*



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meninjau hasil penelitian BATAN. Foto: Angga/nvl

Komisi IX Minta BPJS Ketenagakerjaan Perluas Kepesertaan

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto meminta BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan secara masif dan intensif mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Selain menjadi sarana edukasi, sosialisasi ini bisa untuk meningkatkan kepesertaan BPJS bidang Ketenagakerjaan.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat pekerja, sehingga mereka memahami manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memahami manfaat program, pekerja akan lebih sadar pentingnya ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wenny saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Kalimantan Utara, baru-baru ini.

Wenny menjelaskan, dirinya sangat mendukung setiap pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap setiap pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena sudah terbukti dapat memberikan kepastian, ketenangan dalam bekerja yang akhirnya memberikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memaparkan, setiap pekerja yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan mendapatkan 4 manfaat. Yakni Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Ia juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan, selama pandemi Covid-19, tetap berinovasi dalam melayani masyarakat secara maksimal, tentunya dengan tetap



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kalimantan Utara. Foto: Andri/nvl

mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.

Dalam Kesempatan yang sama Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

“Kami juga membuka beberapa alternatif pelayanan seperti lapak asik yaitu pelayanan tanpa kontak fisik. Jadi orang itu bisa secara *online* antrian dan datang pada jadwalnya,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi upaya BPJS Ketenagakerjaan jumlah kepesertaan, ia menjelaskan BPJS ketenagakerjaan sudah mendapatkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Maret lalu.

“Itu sebagai peluru kita untuk kepesertaan bisa lebih masif lagi. Instruksi presiden itu ke 19 kantor kementerian, semua gubernur, bupati dan wali kota juga badan kelembagaan lain, dapat memberikan optimalisasi terhadap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja khususnya tenaga honorer,” jelas Rahman. ■man/es

DPR Dorong Tana Toraja Jadi Destinasi Wisata Prioritas

Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati akan mengawal aspirasi Plt Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjadikan Tana Toraja sebagai destinasi wisata prioritas. Dalam paparannya, Plt. Gubernur Sulsel mengatakan Tana Toraja sebagai destinasi wisata nomor dua setelah Bali, namun hingga kini belum menjadi destinasi wisata prioritas. Politisi PDI-Perjuangan itu memastikan Komisi X DPR RI akan mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadikan Tana Toraja sebagai destinasi wisata prioritas.

“Karena kalau mendapatkan prioritas, seluruh hal termasuk akses jalan dan yang lain-lainnya menjadi prioritas yang harus diutamakan juga oleh pemerintah pusat, maka kita dorong nanti salah satunya Toraja menjadi salah satu prioritas di Kementerian Pariwisata menjadi skala prioritas,” katanya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Plt. Gubernur Sulsel beserta jajaran, di Makassar, Sulsel, baru-baru ini.

Esti mendapat informasi bahwa para wisatawan tidak menginap di hotel atau penginapan di Tana Toraja, melainkan bermalam di rumah-rumah masyarakat. Oleh karena itu, ia menginginkan masyarakat Tana Toraja mendapatkan pemahaman mengenai destinasi wisata dan sapta pesona.

“Menurut informasi bahwa salah satu destinasi di sini, termasuk Toraja ini bagaimana masyarakatnya itu atau pengunjung-pengunjungnya itu tidak tidur di hotel-hotel, tetapi lebih kepada tidur di tengah-tengah masyarakat, di rumah-rumah

masyarakat. Maka masyarakat harus ditingkatkan pemahaman-pemahaman mengenai destinasi wisata, mengenai sapta pesona, perlu kita berikan secara mendalam kepada mereka,” tutur Esti.

Legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini yakin, dengan memberi edukasi tentang destinasi wisata pada masyarakat Tana Toraja dapat meningkatkan kepariwisataan, perekonomian, dan sektor-sektor lain di Sulsel yang memang membutuhkan dukungan. Akibat pandemi Covid-19 tingkat kunjungan wisatawan jadi sangat rendah, sehingga Komisi X DPR RI secara maksimal akan mendukung program pariwisata Sulsel dapat tercapai dengan baik. ■ nvl/sf

”

MASYARAKAT HARUS DITINGKATKAN PEMAHAMAN-PEMAHAMAN MENGENAI DESTINASI WISATA, MENGENAI SAPTA PESONA, PERLU KITA BERIKAN SECARA MENDALAM KEPADA MEREKA



Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati. Foto: Novel/nvl

Tumbuhkan UMKM, Komisi XI Dorong Peningkatan KUR di Luar Jawa



Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin M. Said bertukar cenderamata dengan mitra kerja. Foto: Tiara/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin M. Said mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasalnya dari segi target penyerapan, Muhidin menilai sudah berjalan baik namun plafon KUR yang diberikan untuk daerah di luar Pulau Jawa masih relatif kecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di pulau Jawa.

"Jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Pulau Jawa yang punya *Non Performing Loan* (NPL) KUR itu bahkan ada yang sampai 3 sampai 4 persen, sementara di Sulsel nol koma. Oleh karena itu saya mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Saya minta supaya dinaikkan dan ditingkatkan plafonnya supaya betul-betul bisa

menjangkau masyarakat UMKM kita. Saya harapkan khususnya di Sulsel kalau bisa ditambah volumenya, karena masih banyak masyarakat kita terutama UMKM itu belum terjangkau dengan hal ini," jelas Muhidin dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Makassar, Sulsel, baru-baru ini.

Politisi dapil Sulawesi Tengah itu menambahkan mekanisme KUR sebaiknya juga diiringi dengan literasi keuangan, agar ke depannya masyarakat bisa mengetahui mekanisme untuk memperoleh KUR. "Khususnya kepada OJK dan BI, dengan tersosialisasikannya mekanisme KUR kepada masyarakat dengan baik diharapkan nantinya masyarakat betul-betul memperoleh informasi bagaimana cara mendapatkan KUR terutama di situasi dan kondisi perekonomian yang

sedang turun akibat pandemi Covid-19 saat ini," tandas Muhidin.

Muhidin mengungkapkan penyaluran KUR di Pulau Jawa relatif cukup besar karena didukung dengan infrastruktur yang sudah baik. Lain halnya di Sulsel yang masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau. Untuk itu dirinya kembali menekankan mendorong KUR yang relatif kecil di Sulsel tadi untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya. "Karena bagaimanapun juga ekonomi bisa bangkit kalau bisa ditopang dengan UMKM yang bagus. Kita bisa bangkit kalau ekonomi itu sehat, nah kalau masyarakat kita sehat ekonomi pasti bagus," tutur politisi Partai Golkar itu.

Senada dengan Muhidin, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai penyaluran KUR di Sulsel masih terbilang relatif sangat terbatas. Menurutnya KUR sangat dibutuhkan oleh UMKM di Sulsel. "Kita lihat NPL-nya juga sangat kecil disini bahkan tidak sampai 1 persen. Ini membuktikan bahwa penyaluran KUR di Sulsel betul-betul dibutuhkan oleh UMKM untuk menggerakkan usahanya," ungkapnya.

Ke depan dirinya berharap, antara regulator fiskal dan regulator keuangan perbankan terus menjalin kerja sama menciptakan kondusifitas perekonomian. "Karena kalau kondisi perekonomian kita kondusif, tentu masyarakat akan bisa beraktifitas, kalau masyarakat bisa beraktifitas tentu akan menggerakkan perekonomian. Mudah-mudahan pandemi di tahun 2021 ini bisa terkendali," harapnya. ■ tra/es

Baleg DPR Sesalkan Gubernur Aceh Tidak Hadir dalam Sosialisasi Prolegnas



Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya bertukar cenderamata dengan jajaran Pemprov Aceh. Foto: Anne/mvl

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh guna mensosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020 - 2024.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menyampaikan sosialisasi Prolegnas kali ini sengaja memprioritaskan Aceh karena mendapat banyak masukan, terutama berkaitan dengan eksistensi Pemerintahan Aceh. Namun, Willy menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Aceh dalam pertemuan tersebut.

"Ini kunjungan pertama Baleg ke Provinsi Aceh dengan membawa rombongan besar, ada dua Pimpinan (Baleg) yang datang, namun Gubernur (Aceh) tidak ada. Tentu kami sangat menyayangkan itu dan kecewa," tegas Willy usai memimpin Kunjungan Kerja Baleg di Kantor Gubernur Aceh, Banda

Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (29/4).

Tim Kunker Baleg diterima Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin dan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar. Turut hadir Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dan sejumlah Anggota Baleg DPR RI, sivitas akademika Universitas Syah Kuala, dan elemen masyarakat. Diketahui, Gubernur Aceh berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan dengan Forkopimda Aceh berkenaan dengan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Menurut Willy, kehadiran Gubernur Aceh sangat krusial, sebab Baleg akan menyerap aspirasi dan melakukan evaluasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), yang juga mengatur Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Politisi dari F-NasDem ini mengungkapkan setiap RUU yang

akan ditetapkan menjadi UU senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga ketidakhadiran pihak pemerintah daerah merupakan preseden buruk.

"Nah, ketika Gubernur tidak punya *good will* atau *political communication* yang baik, maka itu akan menjadi kendala. Tentu, marwah dari Aceh itu sendiri terganggu, ini harus diperbaiki oleh Gubernur, karena tidak mungkin hanya diperjuangkan oleh DPRA maupun elemen masyarakat," terangnya.

Willy menambahkan dalam beberapa kesempatan, pihaknya selalu membuka diri terhadap aspirasi berkaitan eksistensi dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Aspirasi itu datang mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun oleh Anggota Baleg DPR RI dapil Aceh.

Legislator dapil Jawa Timur XI itu juga menyinggung harapan agar dana Otsus Aceh kembali menjadi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah tahun 2027. Sisi lain, lanjutnya DPR RI saat ini tengah membahas perpanjangan Dana Otsus Papua, sehingga tak jarang juga disinggung mengenai perpanjangan otonomi khusus daerah lainnya.

"UU Pemerintahan Aceh sudah ada di *long list* Prolegnas, tinggal bagaimana komunikasinya. Artinya, pemerintah daerah juga perlu pro aktif, langsung jemput bola tidak hanya bersurat. Komunikasi menjadi kunci membangun kesepahaman sehingga terbangun ruang konsultasi antara pemerintah Aceh dengan produk UU yang akan dilahirkan," imbuh Willy. ■ ann/sf

Lewat Diplomasi Total, Berharap Kejayaan Rotan Cirebon Kembali Terangkat

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan prinsip diplomasi total menurutnya adalah dengan mengangkat *local wisdom* atau kebijakan lokal, *local value* (nilai lokal) dan *local product* pada masing-masing daerah di Indonesia.

“Diplomasi total menurut saya dengan mengangkat *local wisdom* atau kebijakan lokal, *local value* dan *local product* pada masing-masing daerah di Indonesia. Karena sebuah Diplomasi secara menyeluruh atau total, harus terlebih dahulu menguatkan nilai-nilai lokal dan nasional,” ungkap Mardani usai menggelar Sosialisasi Diplomasi Parlemen (BKSAP) Sebagai Bagian

dari Diplomasi Total Indonesia, di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat, Senin (26/4).

Dengan kata lain, masih kata Mardani, diplomasi total sekarang ini merupakan sebuah langkah untuk mengangkat budaya lokal. Misalnya, dulu rotan sangat kuat di Cirebon, namun sekarang sedikit sekali. Padahal rotan sesuai dengan prinsip kelestarian, sangat *sustainable*, bisa terus ada. Selain itu, rotan juga bisa memberdayakan masyarakat lokal. Dan rotan ini cukup unik, konon hanya ada dan banyak tumbuh di Cirebon. Dengan kata lain, dulu kerajinan rotan Cirebon sangat luar biasa. Namun saat ini, tidak lagi dikembangkan. Tentu hal itu sangat memprihatinkan.

Oleh karenanya ia berharap

dengan diplomasi parlemen masalah-masalah yang dianggap sulit dapat diselesaikan. Termasuk permasalahan yang menyangkut nilai dan kebijakan lokal tersebut dapat terurai dan sama-sama dapat dicarikan solusinya. Sebagaimana yang dialami oleh sektor sawit Indonesia. Meski masih belum bisa masuk ke Uni Eropa, namun sawit Indonesia telah diperbolehkan di Swiss setelah berhasil memenangkan referendum. Bahkan Swiss juga menghapus bea masuk sawit Indonesia ke negaranya.

Hal itu menurut politisi Fraksi PKS tersebut tidak lepas dari peran diplomasi yang dijalankan oleh semua elemen bangsa. Baik pemerintah, parlemen maupun pihak lainnya. Dengan demikian, ia berharap dengan adanya diplomasi

total, maka nasib rotan di Cirebon pun dapat dikembalikan seperti sediakala, menjadi komoditas unggulan yang bisa meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Cirebon.

Dalam sosialisasi yang dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon itu juga dihadiri Anggota BKSAP Linda Megawati dan Himmatul Aliyah, yang ikut mengamini harapan Mardani dan seluruh masyarakat Cirebon tersebut. ■

ayu/sf



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dalam Sosialisasi Diplomasi Parlemen di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Foto: Ayu/nvl

PKAKN Gelar Seminar Pengelolaan DTKS di Cirebon



Foto bersama jajaran Badan Keahlian DPR RI dengan narasumber dan perwakilan pemda setempat. Foto: Erlangga/rvi

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk 'Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial' di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021. Seminar dan FGD bertujuan memastikan daerah dapat mengumpulkan DTKS yang akurat dan mutakhir untuk menyukseskan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi.

Hal tersebut disampaikan Kepala PKAKN DPR RI Helmizar usai memberikan sambutan dalam pembukaan seminar pada Senin (26/4). Ia mengatakan, PKAKN saat ini tengah menyusun kajian mengenai akuntabilitas pengelolaan DTKS. Penyusunan kajian DTKS ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam berbagai permasalahan yang terjadi pada pengelolaan DTKS di daerah agar diperoleh solusi perbaikan.

"PKAKN tengah melakukan penghitungan untuk dapat mewujudkan DTKS yang akurat dan mutakhir. Sehingga diharapkan dari

hasil ini menjadi telaah dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial yang dicanangkan pemerintah dapat tepat sasaran dan tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai dengan baik," ungkap Helmi, sapaan akrabnya.

Mengacu data yang Helmi peroleh khusus kota dan Kabupaten Cirebon, presentase perbaikan DTKS finalisasi periode Oktober menunjukkan capaian yang positif. Berdasarkan data tersebut, dirinya mengakui PKAKN merasa perlu melakukan seminar dengan para pemangku kepentingan di Cirebon guna memperoleh masukan.

"Saya memberikan apresiasi atas pemutakhiran DTKS di daerah Cirebon ini. Pemutakhiran DTKS di Kota dan Kabupaten Cirebon

menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lainnya. Hal ini tak lepas dari keterlibatan sivitas akademika secara langsung dalam pengelolaan DTKS khususnya pada kegiatan verifikasi," terangnya.

Seminar tersebut turut dihadiri oleh unsur perangkat daerah kota dan kabupaten di Cirebon serta para sivitas akademika yang terus berupaya mendorong adanya pelibatan kampus dalam upaya mengolah DTKS tersebut. Agenda tersebut juga menghadirkan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto secara virtual sebagai *keynote speaker* acara tersebut, serta dihadiri Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul. ■ er/sf

Pentingnya Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Setjen DPR

Inspektur II Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Furcony Putri Sakura mengatakan, penerapan manajemen risiko implementasi *three lines model* dan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko pada unit-unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI penting dilakukan guna meminimalisir dampak kerugian-kerugian yang akan terjadi di masing-masing unit kerja.

Furcony mengungkapkan hal itu dalam *Workshop* Peningkatan Penerapan Manajemen Risiko Melalui Pembangunan Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS), di Tangerang, Banten, Jumat (30/4). “Kami menyelenggarakan *workshop* penerapan manajemen risiko dengan menghadirkan langsung narasumber dari Kementerian Keuangan, berdasarkan pengalaman mereka sudah lama dan bisa kita contohkan,” katanya.

Ia menyampaikan *workshop* tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Peraturan Kepala

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Kami (Ittama Setjen DPR RI) sudah menerapkan manajemen risiko dari tahun 2018, tetapi belum dapat dimaksimalkan.

Inspektur II Sekretariat Jenderal DPR RI Furcony Putri Sakura. Foto: Taufan/Man

Sementara di Kementerian Keuangan sudah (diterapkan) dari 2005, tentu acara ini berhubungan langsung dengan Peraturan Pemerintah, dengan harapan nantinya unit-unit kerja dapat terbuka serta terdokumentasikan dengan benar,” sebut Furcony.

Lebih lanjut ia mengharapkan agar ke depannya unit Eselon II di lingkungan Setjen DPR RI terus memberikan kontribusi dengan mengutus pegawainya di unit kerja masing-masing agar dapat mengikuti *workshop* penerapan manajemen risiko, dengan tujuan membuat kinerja unit kerjanya menjadi jauh lebih baik. ■ tn/sf

”

**KAMI
MENYELENGGARAKAN
WORKSHOP PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO
DENGAN MENGHADIRKAN
LANGSUNG NARASUMBER
DARI KEMENTERIAN
KEUANGAN**



PIA DPR Kembali Berbagi di Kompleks RJA Kalibata



Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI berfoto bersama setelah menggelar bakti sosial dengan memberi paket sembako. Foto: Runi/nvl

Bulan suci tahun ini merupakan Ramadan kedua di masa pandemi Covid-19. Seolah tak ingin tertinggal dalam meraih keberkahan di bulan mulia ini, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI tetap menggelar bakti sosial sebagaimana tahun sebelumnya, berupa pemberian 1850 paket sembako kepada petugas kebersihan, *office boy*, tenaga *outsourcing*, Pengamanan Dalam (Pamdal), hingga pramusaji di lingkungan DPR/MPR/DPD RI.

Ketua Umum PIA DPR RI Tri Hatmanti Utut Adianto mengatakan, walau Ramadan tahun ini masih dalam masa pandemi, namun hal itu tidak menghalangi langkah PIA untuk tetap bisa berbagi kepada sesama. "Ini hari kedua PIA DPR RI menggelar baksos di Ramadan tahun ini. Setelah sebelumnya,

hari Senin, kami gelar di Gedung DPR RI, Senayan. Kali ini kami gelar di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata," ujar Tri Hatmanti sesaat sebelum acara bakti sosial tersebut di RJA Kalibata, Jakarta, Selasa (27/4).

Dijelaskan isteri Anggota DPR RI Utut Adianto itu, selain merupakan program tahunan PIA DPR RI, baksos ini juga sebagai wujud kepedulian PIA terhadap sesama, terutama orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan. Menurutnya di Kompleks RJA Kalibata dan Ulujami banyak orang-orang yang membantu di dalamnya, seperti Pamdal, *cleaning service*, *office boy*, serta tenaga *outsourcing* lainnya.

Meski demikian, ditambahkan Rustini Muhaimin Iskandar, dalam baksos ini tetap mengedepankan

protokol kesehatan. Sehingga pemberian sembako tersebut dilakukan secara simbolis melalui perwakilan. Tidak hanya itu, Anggota PIA DPR yang hadir menyerahkan bantuan juga dibatasi hanya pimpinan dan pengurus PIA DPR RI, serta perwakilan dua anggota PIA DPR RI masing-masing untuk satu fraksi.

Sementara itu Ade Damayanti Rachmat Gobel berharap bantuan sembako seperti beras, minyak, gula, kornet dan biskuit itu dapat bermanfaat dan sedikit mengurangi beban di masa pandemi ini. Ketiga pimpinan PIA DPR RI tersebut tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kekompakan anggota PIA DPR RI. Mereka berharap program positif tersebut bisa terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. ■ ayu/sf

Berbagi di Bulan Ramadan, PIA F-PAN DPR Harap Bisa Ringankan Beban Sesama

Tahun ini, umat Islam sedang menjalani masa Ramadan di tengah Pandemi Covid-19. Situasi ini mengakibatkan berbagai sektor terpukul dan mengalami kesulitan sehingga berdampak pada masyarakat di Indonesia. Memahami kondisi tersebut, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) F-PAN DPR RI melanjutkan kegiatan bakti sosial di lingkungan DPR RI. Anggota PIA DPR RI Sawitri Eddy Soeparno mengungkapkan, kegiatan bakti sosial yang telah berlangsung

selama tiga hari ini tetap bisa memberikan manfaat bagi sesama. Ia mengakui paket yang dibagikan memang tidak luar biasa namun dirinya berharap tidak menghilangkan niat baik dan manfaat untuk lingkungan sekitar.

“Selama pandemi Covid-19 berlangsung, kami (PIA DPR RI, **red**) memang belum melihat ada perubahan yang signifikan. Kami berharap bantuan ini bisa mengurangi beban orang-orang di sekitar kita. Walaupun tidak luar biasa, namun kami berharap tidak menghilangkan

niat baik dan manfaat,” ucap Sawitri usai acara bakti sosial yang digelar di Masjid Baiturrahman MPR/DPR/DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4).

Berbeda dengan tahun lalu, kegiatan yang merupakan hasil kerja kolektif bersama anggota PIA DPR RI ini dilaksanakan dengan tatap muka terbatas dengan menghadirkan perwakilan PIA DPR RI dari Fraksi PAN dan penerima sembako. Sawitri menjelaskan kegiatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga pemberian sembako secara simbolis.

Senada dengan Sawitri, Ade Hafisz Thohir menegaskan dengan digelarnya kegiatan ini dapat membantu meringankan sedikit beban sesama. Ia pun berharap acara ini tetap bisa berjalan setiap tahun.

“Kami bersyukur, di masa pandemi Covid-19, kami diberi kesempatan untuk berbagi dengan sesama. Kami pun turut merasakan susahnyanya keluarga kita dan lingkungan kita dengan kondisi yang seperti ini. Kami berharap dengan pemberian ini bisa meringankan sedikit beban dari mereka. Kami juga turut bahagia bisa berbagi dengan dengan sesama,” tutup Ade. ■ ts/es



Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI berfoto bersama setelah acara bakti sosial yang digelar di Masjid Baiturrahman. Foto: Runi/invl

Setjen DPR Lepas 4 Pegawai Purna Bakti

Dalam acara yang dilakukan secara khidmat itu, Indra berpesan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun agar menyambut masa purnabakti dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Menurut Indra, PNS yang memasuki pensiun merupakan capaian tertinggi

di lingkungan birokrasi. Pasalnya, untuk memasuki masa pensiun dengan paripurna memerlukan upaya, perjuangan, kesabaran serta lindungan dari Allah Yang Maha Kuasa.

“Untuk itu, PNS yang bisa menyandang gelar pensiun harus disyukuri. Masa pensiun bukan akhir pengabdian dari seorang PNS, tetapi juga merupakan anugerah setelah melewati masa pengabdian puluhan tahun. Atas nama Keluarga Besar Setjen DPR RI saya mengucapkan selamat memasuki masa purna bakti kepada Bapak dan Ibu. Semoga pengabdian dan loyalitas yang diberikan kepada negara menjadi amal baik,” ungkap Indra.

Selain itu, Indra juga berharap agar pegawai Setjen DPR RI yang telah memasuki masa pensiun untuk bergabung dalam Persatuan Pensiun Pegawai (P3S) DPR RI. “P3S adalah wadah bagi para pegawai yang pensiun untuk terus bisa berkarya dan sebagai satu forum untuk menjaga silaturahmi baik sesama pensiunan maupun antar pensiunan dan pegawai Setjen DPR RI,” kata Indra.

Adapun, empat pegawai di lingkungan Setjen DPR RI yang memasuki masa purna bakti Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Mei 2021 adalah Cecep Zaini (Bagian Gedung dan Instalasi), Mustofa (Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi), Tini Juhartini (Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi) dan Ujang Karna (Bagian Kendaraan). Pelepasan pegawai ini tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan diakhiri dengan pemberian cenderamata dan hak-hak pensiun serta foto bersama. ■ rnm/atw



Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyerahkan cenderamata kepada PNS yang memasuki masa pensiun. Foto: Tari/hvi

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin upacara pelepasan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna bakti terhitung 1 Mei 2021 di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4). Dalam sambutannya, Indra mewakili keluarga besar Setjen DPR RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan empat pegawai itu.

”

MASA PENSIUN BUKAN AKHIR PENGABDIAN DARI SEORANG PNS, TETAPI JUGA MERUPAKAN ANUGERAH SETELAH MELEWATI MASA PENGABDIAN PULUHAN TAHUN

BURT Harap Pelayanan Bagi Peserta Jamkestama Lebih Cepat dan Mudah



Tim BURT DPR RI dipimpin Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bertukar cenderamata dengan direksi Jasindo Pekanbaru dan RS Awal Bros Pekanbaru. Foto: Erman/Man

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit (RS) Awal Bros Pekanbaru dalam menjalankan program jaminan kesehatan utama (jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Ia berharap, layanan di RS *provider* PT Asuransi Jasindo ini terus ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan.

“Tentunya kita mengharapkan layanan bagi peserta yang sakit, harus cepat dan mudah dilayani oleh RS, karena kita sudah membawa kartu Jamkestama VVIP. Tentu yang namanya VVIP memang harus di luar yang biasa, sehingga cepat diberikan pelayanan,” ungkap Agung usai

memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan Dirut RS Awal Bros Pekanbaru, Kepala Kantor Cabang Jasindo Pekanbaru, di Riau, Selasa (27/4).

Diketahui, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Anggota DPR beserta Keluarga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, Hakim Agung MA, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.

Berdasarkan hal itu PT Asuransi Jasindo sebagai pihak yang ditugaskan, menggelar jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 167/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 55 Tahun 2014.

Dalam paparannya, Direktur Utama RS Awal Bros Pekanbaru Jimmy Kurniawan mengatakan, RS Awal Bros senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan paripurna. Ia mengungkapkan, RS Awal Bros berupaya menjadi RS yang memiliki fasilitas terlengkap dan modern yang didukung dengan tenaga profesional.

“Memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, ramah serta terpercaya dan menjadi RS pilihan di Sumatera. Menjadi RS yang mampu memberikan pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, Mendengar dan Asertif),” pungkas Jimmy. ■ es



SEGENAP PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



RACHMAT GOBEL
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORINBANG



M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORPOLKAM



PUAN MAHARANI
KETUA DPR RI



SUFMI DASCO AHMAD
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KOREKKU



A. MUHAIMIN ISKANDAR
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORKESRA

mengucapkan :

Selamat Hari Raya

Idulfitri

1 Syawal 1442 H

Minal aidin wal faizin
Mohon maaf lahir dan batin



**Tetap Terapkan
Protokol Kesehatan**

